



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

JALAN TANDURUSA KELURAHAN AERTEMBAGA DUA BITUNG 95526
KOTAK POS 18/Bt BITUNG 95501
TELEPON (0438) 21650, 21681 (LACAK), FAKSIMILE (0438) 31477
LAMAN sekretariat@bpppbitung.com

Bitung, 20 Oktober 2025

Yth. :

1. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan
 2. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
- di
Jakarta

SURAT PENGANTAR
B.943/BPPP.BTG/TU.140/X/2025

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja BPPP Bitung Triwulan III Tahun 2025	1 laporan	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Bitung,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Natalia

Diterima oleh :
Nama :
Pada Tanggal :
Cap/Tanda tangan :



LAPORAN KINERJA

BPPP BITUNG

TRIWULAN III

2025



 [bppsdm_bpppbitung](#)
 [bppsdm_bpppbitung](#)
 Bitung - Sulawesi Utara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan perwujudan dari pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian BPPP Bitung berdasarkan target kinerja dan penggunaan anggaran pada Triwulan III Tahun 2025.

Laporan Kinerja BPPP Bitung Triwulan III Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja BPPP Bitung Triwulan III Tahun 2025 ini menggambarkan capaian kinerja yang telah diraih dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk Triwulan III Tahun 2025.

Permasalahan dan kendala yang muncul pada Triwulan III Tahun 2025 menjadi perhatian sebagai antisipasi rencana untuk perbaikan kinerja pada periode selanjutnya. Kami berharap dengan telah disusunnya laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini akan diperoleh manfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan BPPP Bitung, sehingga masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pada pelaporan kinerja periode selanjutnya.

Bitung, 20 Oktober 2025

Kepala BPPP Bitung,



Natalia, S.St.Pi., M.Pi.

NIP. 19801225 200502 2 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Keragaan SDM BPPP Bitung	3
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	4
1.6 Potensi dan Permasalahan	5
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	7
2.1 Rencana Kerja Pemerintah	7
2.2 Rencana Kegiatan Tahun 2025	10
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	11
2.4 Pengukuran Kinerja	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	14
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	14
3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025	39
BAB IV. PENUTUP	43
4.1 Capaian Kinerja Utama	43
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	45
LAMPIRAN	46

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. PNS BPPP Bitung berdasarkan Golongan	3
Tabel 2. PNS BPPP Bitung berdasarkan Tingkat Pendidikan	3
Tabel 3. PNS BPPP Bitung berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	4
Tabel 4. Rencana Kegiatan Tahun 2025	10
Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPPP Bitung dengan Pusat Pelatihan KP Tahun 2025	11
Tabel 6. Perjanjian Kinerja BPPP Bitung dengan Pusat Penyuluhan KP Tahun 2025 ..	12
Tabel 7. Target dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 BPPP Bitung	15
Tabel 8. Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih Per Bidang Pelatihan dan Gender	16
Tabel 9. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih di BPPP Bitung	17
Tabel 10. Perbandingan realisasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih di BPPP Bitung dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP	17
Tabel 11. Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar)	19
Tabel 12. Perbandingan realisasi Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar) dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP	19
Tabel 13. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	21
Tabel 14. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	22
Tabel 15. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	24
Tabel 16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	24
Tabel 17. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	26
Tabel 18. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	26
Tabel 19. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung	28

Tabel 20. Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh per bidang dan Gender.....	29
Tabel 21. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	30
Tabel 22. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (Kelompok)	31
Tabel 23. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya per tingkatan kelas	32
Tabel 24. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (Kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	32
Tabel 25. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (Kelompok)	34
Tabel 26. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung per bidang dan gender	35
Tabel 27. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (Kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	35
Tabel 28. Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (Unit)	37
Tabel 29. Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (orang).....	38
Tabel 30. Realisasi Anggaran Per 30 Juni 2025 BPPP Bitung.....	39
Tabel 31. Efisiensi Anggaran Per 30 Juni 2025 BPPP Bitung.....	40

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Bitung.....	3
Gambar 2. Indeks capaian IKU.....	12
Gambar 3. Skor Kinerja BPPP Bitung Triwulan III Tahun 2025	14
Gambar 4 . Nilai Kinerja Organisasi BPPP Bitung	43

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Perjanjian Kinerja BPPP Bitung	46
Surat Tugas Tim Teknis Tata Kelola Kinerja.....	53

RINGKASAN EKSEKUTIF

BPPSDM KP sesuai dengan fungsinya melaksanakan 3 program utama, yaitu program pengembangan pendidikan KP, program pengembangan pelatihan KP dan program pengembangan penyuluhan KP. Dari 3 program utama tersebut BPPP Bitung sebagai salah satu UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala BPPSDM KP sesuai tugas dan fungsinya mendukung program pengembangan pelatihan dan penyuluhan yaitu melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya dalam pengelolaan kinerjanya, BPPP Bitung melakukan restrukturisasi SAKIP BPPP Bitung yang telah dapat meningkatkan efektifitas organisasi.

Pengukuran capaian kinerja BPPP Bitung Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan <http://kinerjaku.kkp.go.id>. dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Bitung Triwulan III Tahun 2025 masing-masing perspektif sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Bitung yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III karena adanya blokir anggaran (efisiensi);
- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung tercapai sebesar 400 orang dari target 400 orang dengan persentase 100%;
- Nilai PNBP Satker BPPP Bitung tercapai sebesar 0,07 Rupiah Miliar dari target yaitu sebesar 0,12 Rupiah Miliar dengan persentase 120%;
- Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III karena adanya blokir anggaran (efisiensi);

2. Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan:

- Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III karena adanya blokir anggaran (efisiensi);

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan:

- Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung tercapai 75% dari target yaitu 75% atau dengan persentase capaian 100%;

- Indeks profesionalitas ASN BPPP belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III;
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung yaitu 85% dari target 85% atau dengan persentase capaian 100%;
- Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III;
- Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III;
- Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung yaitu 100% dari target 80% atau dengan persentase capaian 120%;
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III;
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III;

4. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan :

- Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung sebanyak 1.504 kelompok dari target yaitu 1.500 kelompok atau dengan persentase 100,27%. Realisasi triwulan ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu karena adanya blokir anggaran (efisiensi) dan baru terbitnya Permen KP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP sehingga perlu penyesuaian data dukung;
- Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung sebanyak kelompok 55 dari target yaitu 48 kelompok atau dengan persentase 114,58%;
- Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung sebanyak 120 kelompok dari target sebesar 100 kelompok atau dengan persentase 120%. Realisasi triwulan ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu karena adanya blokir anggaran (efisiensi) baru terbitnya Permen KP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP sehingga perlu penyesuaian data dukung;
- Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung sebanyak 25 kelompok dari target sebesar 17 kelompok atau dengan persentase 120%;

5. Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan :

- Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III;

6. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan :

- Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III;

Penyelenggaraan program dan kegiatan di BPPP Bitung secara umum telah terlaksana dengan baik dengan capaian sebesar 110,52 dan menghasilkan tingkat capaian seperti pada masing-masing sasaran kinerja di atas berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan BPPP Bitung Triwulan III Tahun 2025. Capaian sasaran Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan kontribusi capaian atas 6 sasaran kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh BPPP Bitung. Secara umum kinerja BPPP Bitung sangat baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap IKU dengan Target Kinerja Tahunan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari capaian ini, diharapkan kinerja di triwulan selanjutnya dapat lebih meningkat.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tahapan dalam siklus manajemen sebuah organisasi unsur pelaporan mempunyai peranan penting untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil yang telah dicapai dari tujuan dari organisasi itu sendiri. Unsur pelaporan semakin penting seiring dengan adanya kebijakan sistem anggaran berbasis kinerja dan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah.

Memperhatikan hal tersebut, dalam rangka perwujudan *Good Governance* diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Perpres tersebut, seluruh instansi pemerintah setiap tahun wajib menyampaikan laporan informasi kinerja kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

BPPP Bitung sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja kepada atasannya. Penyampaian laporan kinerja BPPP Bitung Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis BPPP Bitung, khususnya Penetapan Kinerja tahun 2025. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja BPPP Bitung di masa yang akan datang.

1.2. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP setiap K/L wajib melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2025 kepada Kepala BPPSDM KP melalui Kepala Pusat pelatihan dan Penyuluhan KP. Penyusunan LKJ BPPP Bitung Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPPP Bitung kepada Kepala BPPSDM KP atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan LKJ adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BPPP Bitung selama Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

1.3. Tugas dan Fungsi

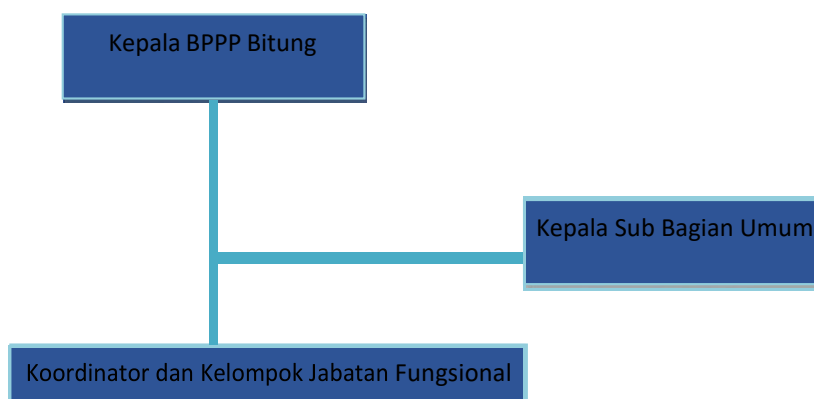
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, bahwa Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang selanjutnya disingkat BPPP, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Dalam Peraturan Menteri KP ini, terdapat 5 (lima) BPPP, salah satu diantaranya adalah BPPP Bitung. Selanjutnya setiap BPPP tersebut mempunyai tugas “melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan” dan dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPP kemudian menyelenggarakan sejumlah fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan di bidang pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- c. Pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- d. Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- e. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- f. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- g. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BPPP dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas masing-masing, sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP Bitung sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/KEPMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung, Struktur Organisasi di BPPP Bitung dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Bitung

1.4. Keragaan SDM BPPP Bitung

Jumlah keseluruhan pegawai BPPP Bitung sampai dengan 30 September 2025 BPPP Bitung sebanyak 400 orang, terdiri dari CPNS 1 orang, PNS 256 orang, 39 orang PPPK, 86 orang penyuluh perikanan bantu, PPNPN 2 orang dan PJLP 16 orang. PNS BPPP Bitung berdasarkan golongan disajikan pada Tabel 1. berikut ini :

Tabel 1. PNS BPPP Bitung berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah
1	Golongan II	69
2	Golongan III	173
3	Golongan IV	24
	Jumlah	266

PNS BPPP Bitung berdasarkan tingkat Pendidikan disajikan pada Tabel 2. berikut ini :

Tabel 2. PNS BPPP Bitung berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	40
2	D3	64
3	S1	134
4	D4	10
5	S2	18
	Jumlah	266

PNS BPPP Bitung berdasarkan kelompok umur disajikan pada Tabel 3. berikut ini :

Tabel 3. PNS dan PPPK BPPP Bitung berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur PNS									Jumlah
≤25	25-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-57	>58	
3	24	34	42	52	45	43	11	12	

Kelompok Umur PPPK			Jumlah
≤25	25-35	36-45	
0	19	20	

No.	Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	CPNS/PNS	146	120	266
2	PPPK	25	14	39

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan KKP, Laporan Kinerja BPPP Bitung Triwulan III Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Kata Pengantar, pada bagian ini menyajikan pengesahan dari Kepala Balai;
- Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini menyajikan ringkasan isi dari laporan kinerja BPPP Bitung Triwulan III Tahun 2025 yang berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala yang dihadapi;
- Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BPPP Bitung;
- Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per sub bab yang berisi rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja;
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator- indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya;
- Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja BPPP Bitung Triwulan III Tahun 2025 dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.;
- Lampiran, disajikan perjanjian kinerja dan lampiran yang dianggap perlu.

1.6. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta riset kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan. BPPP Bitung memiliki 2 (dua) kategori wilayah kerja/pengembangan yang sangat luas yaitu :

- Wilayah pengembangan/kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada kegiatan pelatihan yang meliputi 7 Provinsi dengan 79 Kabupaten/Kota, yaitu : Provinsi Sulawesi Utara (15 Kab/Kota), Gorontalo (6 Kab/Kota), Sulawesi Tengah (13 Kab/Kota), Sulawesi Barat (6 Kab), Sulawesi Selatan (24 Kab/Kota), Kalimantan Timur (10 Kab/Kota) dan Kalimantan Utara (5 Kab/Kota) dengan potensi dan peluang yang harus dikelola oleh BPPP Bitung;
- Wilayah pengembangan/kerja dalam pelaksanaan tugas pada kegiatan Penyuluhan atau sebagai Satminkal Penyuluh Perikanan yang meliputi 4 Provinsi dengan 39 Kabupaten/Kota, yaitu : Provinsi Sulawesi Utara (15 Kab/Kota), Gorontalo (6 Kab/Kota), Sulawesi Tengah (13 Kab/Kota), dan Kalimantan Utara (5 Kab/Kota).

Keberhasilan pencapaian target ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berikut adalah potensi sumberdaya BPPP Bitung dalam mencapai tujuan organisasi :

- 1) Tersedianya SDM yang berlatar pendidikan formal yang memadai dan bersertifikat kompetensi dan keahlian serta berdedikasi;
- 2) Memiliki prasarana dan sarana yang dapat menunjang penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan;
- 3) Sebagian besar SDM BPPP Bitung memiliki usia muda yang produktif;
- 4) BPPP Bitung tersertifikasi SNI ISO 9001:2015;
- 5) Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu;
- 6) Adanya mandat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan kepada BPPP Bitung sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK);
- 7) Tersedianya akses internet di lingkungan Balai.

Disamping potensi tersebut di atas terdapat peluang, sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan pengelolaan potensi Sumber Daya Alam KP dengan meningkatkan kompetensi pelaku utama/usaha KP;
- 2) Adanya jenjang kerjasama pelatihan dengan lembaga lain;

- 3) Adanya tuntutan dunia kerja yang mempersyaratkan sertifikasi kompetensi kerja;
- 4) Adanya peluang peningkatan profesionalisme bagi tenaga pelatihan.

b. Permasalahan

Sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Bitung memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain :

- Aspek penyelenggaraan pelatihan KP :
 - Ketersediaan tenaga pelatih (Instruktur dan Widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa orang sudah memasuki usia purnatugas dan mutasi
 1. Widyaiswara Pengolahan tersisa 2 orang di Tahun 2026
 2. Instruktur Mesin tersisa 2 orang di Tahun 2026
 3. Instruktur dan Widyaiswara Budidaya tersisa 4 orang di Tahun 2026
 4. Instruktur dan Widyaiswara Penangkapan tersisa 7 orang di Tahun 2026
 - Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;
 - Aspek penyelenggaraan penyuluhan KP :
 - Kualitas dan kuantitas penyebaran penyuluh perikanan masih belum memadai;
 - Sarana dan prasarana penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh.
- Tahun 2025 anggaran BOP diblokir.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam pengelolaan kinerja organisasi, BPPP Bitung melaksanakan secara terukur dan terstruktur dengan penekanan pada empat perspektif yang saling berimbang, yaitu *stakeholder perspective*, *Customer perspective*, *Internal Process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, BPPP Bitung telah melakukan penerapan pengelolaan kinerja secara penuh termasuk melakukan penyempurnaan dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPP Bitung dan pelaksanaan SAKIP yang lebih baik.

2.1. Rencana Kerja Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. RKP Tahun 2025 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan dan/atau Kemiskinan Ekstrem.

2.1.1. Arah dan Kebijakan KKP

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas:

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. Peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
2. Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan advanced technology; dan
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

2.1.2 Program Tahun 2025

Program Tahun 2025 melanjutkan nomenklatur dan jumlah program pada tahun 2022 sebanyak 5 (lima) program yang telah menggunakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai salah satu upaya reformasi perencanaan dan penganggaran. RSPP diharapkan dapat mewujudkan implementasi kebijakan money follow program priority, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan integrasi belanja antar kementerian/lembaga untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi belanja pusat-daerah, serta mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur program, kegiatan dan output kegiatan yang mencerminkan real work atau konkret.

2.1.3. Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan BPPP Bitung merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang juga berdasarkan tujuan BPPSDM KP dan Puslatluh KP. Untuk itu tujuan pelatihan dan penyuluhan KP adalah:

1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani;
2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan;
3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing, dan;
4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.4. Sasaran

Sasaran Kegiatan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan 2025-2029 merupakan penjabaran Visi dan Misi pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun ke dalam 6 (Enam) Sasaran Kegiatan yakni:

1. Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan
2. Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
4. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
5. Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

6. Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

BPPP Bitung memiliki 6 (enam) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 19 (Sembilan Belas) Indikator Kinerja program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan beserta target yang akan dicapai Tahun 2025.

Sasaran Kegiatan pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah " Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan ", dengan Indikator Kinerja :

1. Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (orang) dengan target Tahun 2025 sebesar 1.713 orang.
2. Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih BPPP Bitung (orang) dengan target Tahun 2025 sebesar 2.437 orang.
3. Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar) dengan target Tahun 2025 sebesar 0.18 rupiah miliar.
4. Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Bitung (orang) dengan target tahun 2025 sebanyak 30 orang.

Sasaran Kegiatan kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja :

1. Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Bitung (Unit) dengan target Tahun 2025 sebanyak 1 unit

Sasaran Kegiatan ketiga (SK-3) yang akan dicapai adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja :

1. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%) dengan target Tahun 2025 sebesar 100 %
2. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks) dengan target Tahun 2025 sebesar 83 %
3. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%) dengan target tahun 85%
4. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai) dengan target Tahun 2025 sebesar 80
5. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%) dengan target Tahun 2025 sebesar 80%
6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%) dengan target Tahun 2025 sebesar 80%
7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) dengan target Tahun 2025 sebesar 92
8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) dengan target Tahun 2025 sebesar 71,5

Sasaran Kegiatan keempat (SK-4) Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja :

1. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok) dengan target Tahun 2025 sebesar 2.998 kelompok
2. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok) dengan target Tahun 2025 sebanyak 80 kelompok
3. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok) dengan target Tahun 2025 sebesar 296 kelompok
4. Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit) dengan target Tahun 2025 sebesar 27 unit.

Sasaran Kegiatan kelima (SK-5) Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja :

1. Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Bitung (paket) dengan target Tahun 2025 sebesar 1 paket

Sasaran Kegiatan keenam (SK-6) Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja :

1. Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang) dengan target Tahun 2025 sebesar 8 orang

2.2. Rencana Kegiatan Tahun 2025

Tahun 2025 BPPP Bitung melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran awal sebesar Rp.51.160.550.000,- selanjutnya mengalami revisi pengalihan pagu anggaran ke satker lain, sehingga pada triwulan kedua pagu anggaran BPPP Bitung sebesar Rp.51.016.037.000,-. Pada triwulan ketiga terjadi perubahan anggaran BPPP Bitung sebesar Rp. 46.324.046.000,-, dengan rincian kegiatan, yaitu :

Tabel 4. Rencana Kegiatan Tahun 2025

NO	Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp) (Revisi I)	Alokasi Anggaran (Rp) (Revisi II)
I	DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	5.544.810.000	2.510.574.000
	1. DL.2375 Pelatihan Kelautan dan Perikanan	3.188.960.000	166.574.000
	2. DL.7020 Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2.355.850.000	2.344.000.000
II	WA Program Dukungan Manajemen	45.471.227.000	43.813.472.000
	1. WA.2378 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	45.471.227.000	43.813.472.000
Total Anggaran		51.016.037.000	46.324.046.000

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BPPSDM KP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan Sasaran Kegiatan BPPP Bitung. Berkaitan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga BPPP Bitung memiliki 2 perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja dengan Pusat Pelatihan dan Pusat Penyuluhan. Adapun Perjanjian Kinerja BPPP Bitung pada Tahun 2025 sebagai berikut :

2.3.1. Perjanjian Kinerja BPPP Bitung dengan Pusat Pelatihan KP Tahun 2025.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPPP Bitung dengan Pusat Pelatihan KP Tahun 2025.

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Bitung (orang)	1.713
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	2.437
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)	0,18
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Bitung (orang)	30
2	Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	5	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung (unit)	1
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	100
		7	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	83
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	85
		9	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	80
		10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%)	80
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	80
		12	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	92
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	71,5

2.3.2. Perjanjian Kinerja BPPP Bitung dengan Pusat Penyuluhan KP Tahun 2025.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja BPPP Bitung dengan Pusat Penyuluhan KP Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	2.998
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	80
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	296
		4	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (paket)	27
		5	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)	8

2.4. Pengukuran Kinerja

2.4.1 Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPPP Bitung tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada manual IKU pada masing-masing indikator. Perhitungan Indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Nilai 100 – 120 adalah kategori istimewa dengan kode warna biru;
2. Nilai 90 - < 110 adalah kategori baik dengan kode warna hijau;
3. Nilai 70 - < 90 adalah kategori cukup dengan kode warna kuning;
4. Nilai 50 - < 70 adalah kategori kurang dengan kode warna merah;
5. Untuk nilai < 50 adalah kategori sangat kurang dengan kode warna hitam; Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110 – 120
Baik	Nilai 90 - < 110
Cukup	Nilai 70 - < 90
Kurang	Nilai 50 - < 70
Sangat kurang	Untuk nilai < 50

Gambar 2. Indeks Capaian IKU

Sumber : kinerjaku.kkp.go.id

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing- masing Indikator.

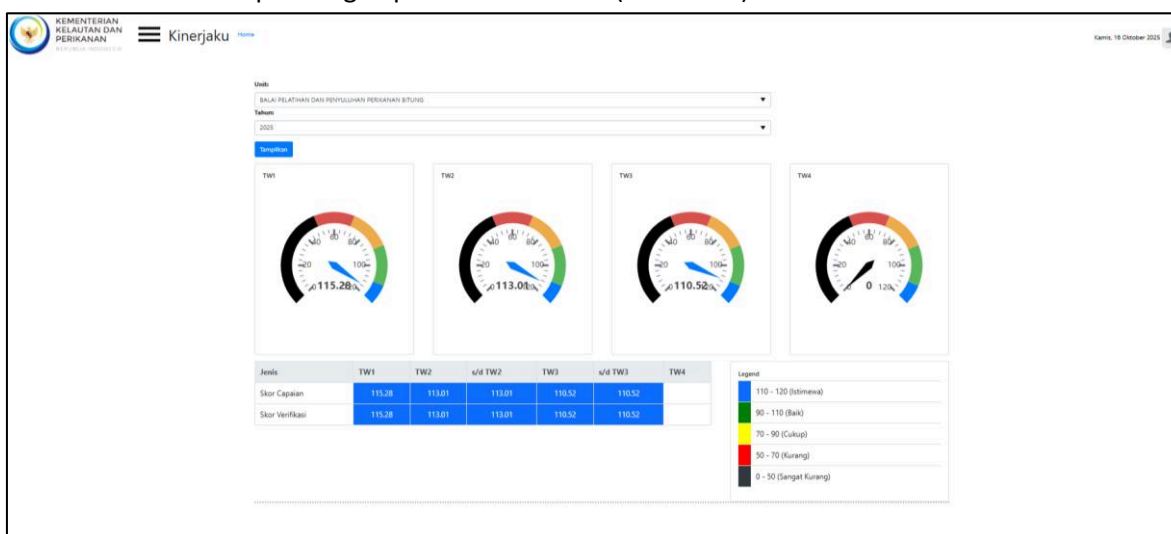
2.4.2 Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja BPPP Bitung dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran dan pelaporan kinerja telah ditugaskan dan ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala BPPP Bitung Nomor : B.27/BPPP.BTG/TU.140/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 yaitu Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Tahun 2025. Keanggotaan tim terdiri dari pegawai yang memiliki kualifikasi terkait pengukuran dan pelaporan kinerja dibuktikan dengan sertifikat.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja BPPP Bitung Triwulan III Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Bitung Triwulan III Tahun 2025 sebesar 110,52% dengan Nilai Kinerja Organisasi berwarna biru yang berarti bahwa target yang telah ditetapkan pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan dan dicapai dengan predikat Istimewa (Gambar 3).



Gambar 3. Skor Kinerja BPPP Bitung Triwulan III Tahun 2025

Sumber : kinerjaku.kkp.go.id

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPP Bitung. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategis BPPP Bitung yang menjadi kontrak kerja pada Triwulan III Tahun 2025 dapat dicapai.

Tabel 7. Target dan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 BPPP Bitung

No.	Sasaran Kinerja	No.	Indikator	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Persentase Realisasi (%)
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Bitung (orang)	1.713	0	0	0
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	2.437	400	400	100,00
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)	0,18	0,07	0,12	120,00
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Bitung (orang)	30	0	0	0
2	Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	5	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung (unit)	1	0	0	0
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	100,00	75	75	100,00
		7	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	83	0	0	0
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	85	85	100	120,00
		9	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	80	0	0	0
		10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%)	80	0	0	0
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	80	80	100	120,00
		12	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	92	0	0	0
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	71,5	0	0	0
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	2.998	1.500	1.504	100,27
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	80	48	55	114,58
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	296	100	120	120,00
		4	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)	27	17	20	117,65
		5	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Bitung (paket)	1	0	0	0
		6	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)	8	0	0	0

Sumber : Aplikasi Kinerja KKP

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan

- **IKSK.01.01 Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Bitung (orang)**

Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Bitung yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III karena adanya blokir anggaran (efisiensi).

- **IKSK.01.02 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)**

Pada tahun 2025 pelatihan bagi masyarakat kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan tatap muka. Pelatihan tersebut menggunakan anggaran APBN dalam DIPA BPPP Bitung TA 2025. Pelatihan yang diselenggarakan BPPP Bitung pada Triwulan III Tahun 2025 terdiri dari pelatihan tatap muka dengan beberapa bidang pelatihan.

Tabel 8. Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih Per Bidang Pelatihan dan Gender

No	Bidang Pelatihan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (Orang)
1	Budidaya	81	19	100
2	Kepelautan	298	2	300

Berdasarkan Tabel 8, jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang mengikuti pelatihan terbagi dalam dua bidang utama, yaitu budidaya dan kepelautan, dengan total peserta sebanyak 400 orang. Pada bidang budidaya, jumlah peserta laki-laki mencapai 81 orang, sedangkan peserta perempuan sebanyak 19 orang, sehingga totalnya 100 orang. Sementara itu, pada bidang kepelautan, pelatihan diikuti oleh 298 peserta laki-laki dan 2 peserta perempuan, dengan total 300 orang.

Data ini menunjukkan bahwa keterlibatan peserta laki-laki masih mendominasi di kedua bidang pelatihan, terutama pada bidang kepelautan. Namun demikian, adanya partisipasi perempuan dalam kedua bidang tersebut mencerminkan mulai meningkatnya peran perempuan dalam kegiatan pelatihan di sektor kelautan dan perikanan yang diselenggarakan oleh BPPP Bitung. Pelatihan yang telah dilaksanakan merupakan bagian dari program pemberantasan kemiskinan ekstrim. Capaian IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih di BPPP Bitung

Terseleenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan										
IK 2. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (Orang)										
Realisasi TW III				2025					Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021 - 2024										
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Capaian	% Penurunan TW III 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
1.290	1.456	1.680	2.738	2.437	400	400	100,00%	85,39	2.998	13,34

Berdasarkan data pada tabel, jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Bitung menunjukkan peningkatan signifikan selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, jumlah peserta pelatihan tercatat sebanyak 1.290 orang, meningkat menjadi 1.456 orang pada 2022, dan kembali naik menjadi 1.680 orang pada 2023. Peningkatan yang cukup besar terjadi pada tahun 2024, dengan jumlah peserta mencapai 2.738 orang. Untuk tahun 2025, BPPP Bitung menetapkan target sebanyak 2.998 orang peserta pelatihan. Hingga Triwulan III tahun 2025, target pelatihan sebesar 400 orang telah terealisasi 100%. Namun, jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 85,39%. Penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya blokir anggaran (efisiensi).

Secara keseluruhan, hingga periode ini tingkat capaian terhadap target tahunan 2025 baru mencapai 13,34%, menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan masih perlu ditingkatkan pada triwulan berikutnya agar target tahunan dapat terpenuhi. Data ini menggambarkan bahwa BPPP Bitung masih memiliki ruang yang cukup besar untuk memperluas jangkauan pelatihan guna mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Perbandingan realisasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih di BPPP

Bitung dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (Orang)	Realisasi Capaian Satker (Orang)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	200	226	113,00
2	BPPP Tegal	11.144	13.438	120,00
3	BPPP Banyuwangi	1.000	1.710	120,00
4	BPPP Ambon	240	255	106,25
5	BPPP Bitung	400	400	100,00

Berdasarkan Tabel 10, terlihat bahwa capaian pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan di berbagai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) lingkup BPPSDM KP menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari lima satuan kerja (Satker) yang tercantum, seluruhnya

berhasil mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. BPPP Medan menargetkan pelatihan bagi 200 orang, namun berhasil melatih 226 orang atau sebesar 113% dari target. BPPP Tegal menunjukkan capaian tertinggi secara absolut dengan target 11.144 orang dan realisasi mencapai 13.438 orang, atau 120% dari target. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh BPPP Banyuwangi, yang menargetkan 1.000 orang dan mampu merealisasikan pelatihan hingga 1.710 orang atau 120% dari target. Sementara itu, BPPP Ambon berhasil melatih 255 orang dari target 240 orang, dengan tingkat capaian 106,25%. Adapun BPPP Bitung mencapai hasil yang sesuai target, yakni 400 orang dengan persentase realisasi 100%. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan oleh BPPP lingkup BPPSDM KP berjalan efektif, dengan sebagian besar satker berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, termasuk BPPP Bitung yang mampu memenuhi sasaran pelatihannya secara optimal..

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target IKU ini antara lain :

1. Tersedianya pedoman penyelenggaraan pelatihan, instruktur yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang dilatihkan.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
3. Database penyelenggaraan pelatihan sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pelatihan di BPPP Bitung.

Kegiatan positif yang dilakukan dalam menunjang pencapaian target IKU ini antara lain:

1. Koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Universitas, Perusahaan dan penyuluh perikanan.
2. Pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program BPPSDM KP dan ketersediaan anggaran dan sumber daya.

● **IKSK.01.03 Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar)**

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Berikut rincian target PNBP Triwulan III Tahun 2025.

Tabel 11. Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar)

Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan										
IK 3. Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar)										
Realisasi TW III				2025					Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021 - 2024										
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Capaian	% Penurunan TW III 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
-	-	0,12	0,39	0,18	0,07	0,12	120	69,23	0,18	66,67

Berdasarkan data pada tabel, nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari satuan kerja BPPP Bitung mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode 2021–2022, belum terdapat realisasi PNBP yang tercatat, namun mulai tahun 2023 terdapat capaian sebesar 0,12 rupiah miliar, dan meningkat menjadi 0,39 rupiah miliar pada tahun 2024. Untuk tahun 2025, BPPP Bitung menargetkan nilai PNBP sebesar 0,18 rupiah miliar. Hingga Triwulan III tahun 2025, realisasi telah mencapai 0,12 rupiah miliar, atau 120% dari target triwulan sebesar 0,07 rupiah miliar. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2024, terdapat penurunan sebesar 69,23%.

Secara keseluruhan, hingga saat ini tingkat capaian terhadap target tahunan 2025 baru mencapai 66,67%, yang menunjukkan bahwa BPPP Bitung masih perlu mengoptimalkan kegiatan pada triwulan berikutnya untuk mencapai target penuh. Meski terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian PNBP hingga Triwulan III menunjukkan kinerja positif karena telah melampaui target parsial, menandakan upaya yang konsisten dalam mendukung peningkatan pendapatan negara melalui kegiatan pelatihan SDM kelautan dan perikanan. Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) salah satunya berasal dari layanan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi, Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya dan Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Perbandingan realisasi Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar) dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (Rupiah Miliar)	Realisasi Capaian Satker (Rupiah Miliar)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	0,04	0,05	120,00
2	BPPP Tegal	12,01	20,17	120,00
3	BPPP Banyuwangi	0,12	0,18	120,00
4	BPPP Ambon	0,50	0,66	120,00
5	BPPP Bitung	0,07	0,12	120,00

Berdasarkan Tabel 12, capaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari masing-masing Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) di lingkungan BPPSDM KP menunjukkan kinerja yang sangat baik. Seluruh satuan kerja (Satker) berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi mencapai 120% di masing-masing satker. Secara rinci, BPPP Medan menargetkan PNBP sebesar 0,04 rupiah miliar dan berhasil merealisasikan 0,05 rupiah miliar. BPPP Tegal mencatat capaian tertinggi secara nominal, dengan target 12,01 rupiah miliar dan realisasi 20,17 rupiah miliar, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap total PNBP BPPSDM KP. BPPP Banyuwangi mencapai realisasi Rp0,18 miliar dari target 0,12 rupiah miliar, sementara BPPP Ambon berhasil merealisasikan 0,66 rupiah miliar dari target 0,50 rupiah miliar. Adapun BPPP Bitung juga menunjukkan kinerja optimal dengan target 0,07 rupiah miliar dan realisasi 0,12 rupiah miliar, atau setara dengan 120% capaian. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa seluruh BPPP lingkup BPPSDM KP, termasuk BPPP Bitung, mampu melaksanakan pengelolaan kegiatan yang efektif dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan penerimaan negara melalui PNBP di sektor kelautan dan perikanan. Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target IKU ini antara lain :

1. Tersedianya sarana/prasarana yang cukup memadai sehingga menarik minat pengguna jasa untuk menggunakan layanan.
2. Adanya komitmen pimpinan dalam meningkatkan PNBP.

Kegiatan positif yang dilakukan dalam menunjang pencapaian target IKU ini yaitu terus-menerus dilakukan upaya dalam meningkatkan kualitas layanan dan melakukan promosi melalui media sosial. Perolehan PNBP tergantung dari stakeholder yang memanfaatkan layanan dan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana sehingga tidak dapat dikendalikan atau diperkirakan pendapatannya secara pasti pada setiap periode. Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Triwulan III Tahun 2025, BPPP Bitung memiliki beberapa kegiatan strategis yaitu hasil samping kegiatan pengolahan hasil perikanan, sewa rumah dinas, sewa foodcourt, sewa asrama, sewa koperasi dan karcis masuk eduwisata.

- **IKSK. 01.04. Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung (orang)**

Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III karena adanya blokir anggaran (efisiensi).

Sasaran Kegiatan 2 Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

- **IKSK.02.01 Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung (unit)**

Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III karena adanya blokir anggaran (efisiensi).

Sasaran Kegiatan 3 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

IKSK.03.01 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)

Layanan Dukungan manajemen internal meliputi dokumen perencanaan anggaran, perencanaan kinerja, rewiu renstra, laporan kinerja, laporan SPIP, laporan pertanggung jawaban, laporan PNBP, weekly report, laporan program dan kegiatan, laporan keuangan, laporan BMN, laporan PM SAKIP, laporan barang KPA dan laporan PIPK Tahun 2025. Adapun data dukung capaian triwulan III tahun 2025 yang harus dilengkapi meliputi dokumen perencanaan anggaran; perencanaan kinerja; rewiu renstra; laporan kinerja; laporan SPIP; laporan per tanggung jawaban bulan Juni, Juli dan Agustus 2025; laporan PNBP Juni, Juli dan Agustus 2025; dan weekly report Juli, Agustus dan September 2025;

Tabel 13. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IK 6. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)										
Realisasi TW III 2021 - 2024				2025					Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025- 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Capaian	% Kenaikan/Penur unan TW III 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
75,00	75,00	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00	0,00	100,00	75,00

Berdasarkan data pada tabel, persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung selama periode 2021–2024 menunjukkan nilai yang stabil, yakni 75% setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan layanan dukungan manajemen internal yang mendukung kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Untuk tahun 2025, BPPP Bitung menetapkan target capaian sebesar 100%. Hingga Triwulan III tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 75%, dan realisasi capaian juga tercatat 75%, sehingga tingkat capaian triwulan mencapai 100% dari target TW III. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2024, tidak terdapat perubahan, dengan persentase kenaikan atau penurunan sebesar 0%. Secara keseluruhan, capaian terhadap target tahunan 2025 mencapai 75%, menunjukkan bahwa pelaksanaan dukungan manajemen internal berjalan sesuai rencana dan tetap terjaga stabilitasnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPP Bitung.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target IKU ini adalah adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari seluruh SDM BPPP Bitung. Analisis keberhasilan dari capaian IKU ini adalah penyajian laporan dan data dukung serta ketetapan waktu dalam melakukan penginputan data capaian. Efisiensi sumberdaya bahwa dalam pencapaian kegiatan ini didukung oleh SDM BPPP Bitung yang telah mengikuti bimtek/diklat/pelatihan sesuai bidang dan didukung dengan sistem pelaporan melalui aplikasi. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya bahwa dalam mencapai indikator ini diselesaikan oleh SDM BPPP Bitung yang kompeten dibidangnya. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (%)	Realisasi Capain Satker (%)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	75,00	78,18	104,24
2	BPPP Tegal	75,00	77,50	103,33
3	BPPP Banyuwangi	75,00	83,64	111,52
4	BPPP Ambon	75,00	80,00	106,66
5	BPPP Bitung	75,00	75,00	100,00

Berdasarkan Tabel 14, pelaksanaan layanan dukungan manajemen internal pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) lingkup BPPSDM KP menunjukkan hasil yang baik dan konsisten. Seluruh satuan kerja (Satker) berhasil mencapai, bahkan sebagian besar melampaui, target yang telah ditetapkan sebesar 75%. Secara rinci, BPPP Medan mencatat realisasi sebesar 78,18% atau 104,24% dari target. BPPP Tegal juga menunjukkan capaian yang tinggi dengan realisasi 77,50% atau 103,33% dari target. Sementara itu, BPPP Banyuwangi menjadi satker dengan persentase tertinggi, mencapai 83,64% atau 111,52% dari target yang ditetapkan. BPPP Ambon berhasil mencapai 80,00%, setara dengan 106,66% dari target. Adapun BPPP Bitung menunjukkan capaian yang stabil dengan realisasi 75,00%, atau 100% dari target, menandakan bahwa pelaksanaan dukungan manajemen internal telah berjalan sesuai perencanaan dan target kinerja. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa seluruh BPPP di bawah BPPSDM KP telah mampu mengelola layanan dukungan manajemen internal dengan baik. Kinerja tersebut menunjukkan efektivitas koordinasi, efisiensi operasional, dan komitmen setiap satker dalam menjaga kualitas tata kelola kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja pada Triwulan III Tahun 2025, BPPP Bitung melaksanakan beberapa langkah strategis, di antaranya:

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi Berkala dilaksanakan secara mingguan untuk memastikan progres capaian kinerja berjalan sesuai rencana dan dilakukan secara triwulanan guna mengevaluasi hasil yang telah dicapai dan menyusun langkah tindak lanjut yang diperlukan.
2. Pemantauan dan Penyelesaian Dokumen untuk memastikan seluruh dokumen yang telah ditargetkan dapat diselesaikan tepat waktu dan mengidentifikasi kendala dalam pemenuhan dokumen serta mencari solusi efektif untuk mengatasinya.
3. Penyusunan Dokumen dan Pembuatan Laporan Dukungan Manajerial sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap capaian kinerja dan menyusun laporan dukungan manajerial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta memastikan pencapaian indikator kinerja yang optimal di BPPP Bitung sepanjang Triwulan III Tahun 2025.

IKSK.03.02 Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas pekerjaan. IKU Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. IKU indeks profesionalitas ASN BPPP Bitung dilakukan penilaian pada semester I (triwulan II) dan semester II (triwulan IV).

IKSK.03.03 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung merupakan rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dari hasil audit, reviu dan evaluasi yang telah diterbitkan (selama periode pengukuran) ditindaklanjuti secara tuntas oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. Capaian IKU Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 15. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IK 8. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)										
Realisasi TW III 2021 - 2024				2025					Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Capaian	% Penurunan TW III 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
-	-	100	100	85	85	85	100,00	15,00	85	100,00

Berdasarkan data pada tabel, persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung menunjukkan konsistensi yang baik dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode 2023 dan 2024, realisasi pemanfaatan hasil pengawasan mencapai 100%, menandakan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti secara optimal. Untuk tahun 2025, BPPP Bitung menargetkan capaian sebesar 85%, dan hingga Triwulan III tahun 2025, realisasi telah mencapai 85%, atau 100% dari target triwulan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan masih berjalan sesuai rencana. Namun demikian, bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 15%. Meskipun demikian, secara keseluruhan, tingkat capaian terhadap target tahunan 2025 telah mencapai 100%, yang mencerminkan komitmen BPPP Bitung dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (%)	Realisasi Capain Satker (%)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	85,00	85,00	100,00
2	BPPP Tegal	85,00	100,00	117,65
3	BPPP Banyuwangi	85,00	85,00	100,00
4	BPPP Ambon	85,00	85,00	100,00
5	BPPP Bitung	85,00	85,00	100,00

Berdasarkan Tabel 14, pelaksanaan **layanan dukungan manajemen internal** pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) lingkup BPPSDM KP menunjukkan hasil yang baik dan konsisten. Seluruh satuan kerja (Satker) berhasil mencapai, bahkan sebagian besar melampaui, target yang telah ditetapkan sebesar **75%**. Secara rinci, **BPPP Medan** mencatat realisasi sebesar

78,18% atau **104,24%** dari target. **BPPP Tegal** juga menunjukkan capaian yang tinggi dengan realisasi **77,50%** atau **103,33%** dari target. Sementara itu, **BPPP Banyuwangi** menjadi satker dengan persentase tertinggi, mencapai **83,64%** atau **111,52%** dari target yang ditetapkan. **BPPP Ambon** berhasil mencapai **80,00%**, setara dengan **106,66%** dari target. Adapun **BPPP Bitung** menunjukkan capaian yang stabil dengan realisasi **75,00%**, atau **100%** dari target, menandakan bahwa pelaksanaan dukungan manajemen internal telah berjalan sesuai perencanaan dan target kinerja. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa seluruh BPPP di bawah BPPSDM KP telah mampu mengelola layanan dukungan manajemen internal dengan baik. Kinerja tersebut menunjukkan efektivitas koordinasi, efisiensi operasional, dan komitmen setiap satker dalam menjaga kualitas tata kelola kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Keberhasilan dalam pencapaian IKU pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja didukung oleh tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengisian aplikasi SIDAK KKP. Aplikasi ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Salah satu kegiatan strategis yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan adalah peningkatan kompetensi operator yang menangani aplikasi SIDAK KKP. Dengan peningkatan kompetensi ini, operator dapat mengelola dan menginput data sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, sehingga progress capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik.

IKSK.03.04 Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)

Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung belum diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan II namun telah dilengkapi sesuai lembar kerja evaluasi pada triwulan III.

IKSK.03.05. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung belum diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III.

IKSK. 03.06. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu

pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tabel 17. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
IK 11. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)										
Realisasi TW III 2021 - 2024				2025					Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Capaian	% Kenaikan TW III 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
-	-	-	-	80	80	100	120,00	120,00	80	120,00

Berdasarkan data pada tabel, persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang dan Jasa (PBJ) yang diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) oleh BPPP Bitung pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Pada tahun-tahun sebelumnya (2021–2024), belum terdapat data realisasi yang tercatat. Namun, untuk tahun 2025, BPPP Bitung menargetkan 80% pengumuman RUP PBJ. Hingga Triwulan III tahun 2025, realisasi telah mencapai 100%, atau 120% dari target triwulan, menunjukkan pelaksanaan yang melampaui sasaran yang ditetapkan. Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian ini menunjukkan peningkatan sebesar 120%, menandakan adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa. Secara keseluruhan, persentase capaian terhadap target tahunan 2025 juga mencapai 120%, mencerminkan komitmen BPPP Bitung dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan rencana umum pengadaan barang dan jasa secara terbuka dan tepat waktu melalui sistem SIRUP. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (%)	Realisasi Capaian Satker (%)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	80,00	100,00	120,00
2	BPPP Tegal	80,00	100,00	120,00
3	BPPP Banyuwangi	80,00	100,00	120,00
4	BPPP Ambon	80,00	100,00	120,00
5	BPPP Bitung	80,00	100,00	120,00

Berdasarkan Tabel 18, seluruh satuan kerja (Satker) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) lingkup BPPSDM KP menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa pemerintah (PBJ) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Kelima BPPP yang tercantum dalam tabel, yaitu BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Ambon, dan BPPP Bitung, masing-masing menargetkan capaian sebesar 80% dan berhasil merealisasikan 100% dari RUP yang diumumkan pada SIRUP. Dengan demikian, seluruh satker mencapai tingkat realisasi sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh BPPP, termasuk BPPP Bitung, telah melaksanakan kewajiban pengumuman RUP secara tepat waktu, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen tinggi terhadap prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPPSDM KP. Secara keseluruhan, hasil tersebut menggambarkan efektivitas dan kepatuhan seluruh BPPP terhadap regulasi pengadaan pemerintah, serta menjadi indikator positif dalam tata kelola administrasi dan perencanaan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. Faktor keberhasilan dalam pencapaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang diumumkan pada SIRUP di BPPP Bitung meliputi komitmen kuat dari pimpinan dan tim pengadaan dalam menyusun dan mengumumkan RUP tepat waktu, serta kedisiplinan dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan LKPP. Selain itu keberhasilan juga ditunjang oleh penguasaan teknis dan optimalisasi penggunaan sistem SIRUP, adanya monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan seluruh proses penyusunan dan pengumuman RUP berjalan sesuai target. Kegiatan strategis yang dilakukan yaitu penerapan sistem pengendalian internal, monitoring progres input RUP, serta evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan.

IKSK.03.12 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III.

IKSK.03.13 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III.

Sasaran Kegiatan 1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKSK.01.01. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh Satker BPPP Bitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (Kelompok)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan										
IK 1. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)										
Realisasi TW III 2021 - 2024				2025					Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Capaian	% Penurunan TW III 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
1.860	1.601	1.400	2.350	2.998	1.500	1.504	100,27%	36,00	2.998	50,17

Berdasarkan data pada tabel, jumlah kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yang disuluh oleh BPPP Bitung selama periode 2021–2024 menunjukkan fluktuasi capaian. Pada tahun 2021, jumlah kelompok yang disuluh mencapai 1.860 kelompok, kemudian mengalami penurunan menjadi 1.601 kelompok pada 2022, dan turun kembali menjadi 1.400 kelompok pada 2023. Namun, pada tahun 2024, jumlah kelompok yang disuluh meningkat signifikan menjadi 2.350 kelompok. Untuk tahun 2025, BPPP Bitung menargetkan 2.998 kelompok. Hingga Triwulan III tahun 2025, target triwulan ditetapkan sebanyak 1.500 kelompok, dan realisasi mencapai 1.504 kelompok, atau 100,27% dari target TW III, yang berarti target triwulan telah tercapai bahkan sedikit melampaui. Namun demikian, bila dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2024, terdapat penurunan sebesar 36%.

Penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya penyesuaian persyaratan data dukung dalam Manual IKU dan adanya blokir anggaran (efisiensi) dan baru terbitnya Permen KP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP sehingga perlu penyesuaian data dukung. Pada pertengahan tahun 2022 data capaian kelompok masyarakat KP yang disuluh oleh penyuluh perikanan yang disahkan oleh Kepala Satminkal, dilengkapi dengan link data dukung profil. Selanjutnya pada tahun 2023 data kelompok masyarakat KP yang telah disuluh oleh penyuluh perikanan yang disahkan oleh Kepala Satminkal, dilengkapi dengan link data dukung profil kelompok yang dilengkapi lampiran SK penumbuhan atau piagam peningkatan kelas kelompok. Sementara itu pada Tahun 2025 penurunan terjadi karena adanya penyesuaian pedoman yang mengatur administrasi (kode registrasi, dll) dan profil kelompok sesuai perubahan kelembagaan kelompok dalam Permen KP nomor 28 Tahun 2024.

Secara keseluruhan, hingga periode ini tingkat capaian terhadap target tahunan 2025 mencapai 50,17%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan masih berjalan dengan baik, tetapi memerlukan peningkatan intensitas pada triwulan berikutnya agar target tahunan dapat tercapai secara optimal. Capaian ini mencerminkan komitmen BPPP Bitung dalam mendukung penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan guna memperkuat kapasitas kelompok pelaku utama dan pelaku pendukung di wilayah binaan.

Tabel 20. Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh per bidang dan Gender

No	Bidang	Jumlah (kelompok)	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Budidaya	565	4.929	1.186
2	Pengolahan / Pemasaran	110	270	897
3	Penangkapan	816	8.522	230
4	Garam	7	49	29
5	Pokmaswas	5	59	7
6	Konservasi	1	16	0
	Jumlah	1.504	13.845	2.349

Berdasarkan data pada Tabel 20, kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh BPPP lingkup BPPSDMKP mencakup berbagai bidang usaha perikanan dan kelautan dengan total 1.504 kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah disuluh. Dari total tersebut, tercatat 13.845 orang laki-laki dan 2.349 orang perempuan yang menjadi peserta kegiatan penyuluhan. Jika dilihat berdasarkan bidangnya, penangkapan ikan merupakan sektor dengan jumlah kelompok terbanyak, yaitu 816 kelompok, melibatkan 8.522 laki-laki dan 230 perempuan. Sementara itu, pada bidang budidaya perikanan, terdapat 565 kelompok dengan 4.929 laki-laki dan 1.186 perempuan, menunjukkan partisipasi perempuan yang cukup tinggi dibandingkan bidang lainnya. Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mencatat 110 kelompok, dengan 270 laki-laki dan 897 perempuan, di mana dominasi peserta perempuan terlihat jelas, sejalan dengan karakteristik kegiatan pasca panen yang umumnya banyak melibatkan perempuan. Selanjutnya, pada bidang garam terdapat 7 kelompok dengan total 78 peserta, terdiri dari 49 laki-laki dan 29 perempuan. Untuk bidang Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) tercatat 5 kelompok dengan 59 laki-laki dan 7 perempuan, sedangkan bidang konservasi hanya memiliki 1 kelompok dengan 16 peserta laki-laki tanpa keterlibatan peserta perempuan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan telah mencakup berbagai sektor utama perikanan dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dari pelaku laki-laki, namun partisipasi perempuan juga terlihat signifikan terutama pada bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21. Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh (%) dengan BPPP Lingkup
BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (kelompok)	Realisasi Capain Satker (kelompok)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	3.150	3.640	115,55
2	BPPP Tegal	-	-	-
3	BPPP Banyuwangi	4.000	5.000	120,00
4	BPPP Ambon	2.000	2.050	103,00
5	BPPP Bitung	1.500	1.504	100,26

Berdasarkan data pada Tabel 21, capaian penyuluhan kepada kelompok pelaku utama/pelaku usaha oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) di lingkup BPPSDMKP menunjukkan hasil yang bervariasi antar satuan kerja. BPPP Medan mencatatkan capaian sebesar 115,55% dengan realisasi 3.640 kelompok dari target 3.150 kelompok, menandakan kinerja yang melampaui target. BPPP Banyuwangi juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi 5.000 kelompok dari target 4.000 kelompok, atau sebesar 120,00%, menjadi capaian tertinggi di antara satuan kerja lainnya. Sementara itu, BPPP Ambon berhasil mencapai 103,00%, dengan 2.050 kelompok tersuluh dari target 2.000 kelompok, yang berarti target telah terpenuhi dengan baik. Adapun BPPP Bitung mencapai 100,26%, dengan realisasi 1.504 kelompok dari target 1.500 kelompok, menunjukkan pencapaian yang sangat mendekati rencana. Sementara itu, BPPP Tegal belum memiliki data target maupun realisasi pada periode pelaporan ini. Secara keseluruhan, sebagian besar satuan kerja BPPP telah berhasil melampaui target penyuluhan terhadap kelompok pelaku utama/pelaku usaha, menunjukkan komitmen dan efektivitas pelaksanaan kegiatan penyuluhan di lapangan.

Keberhasilan kegiatan penyuluhan terus ditingkatkan oleh Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu BPPP Bitung dalam mendampingi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam sektor perikanan, mendukung pemerataan serta peningkatan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Faktor utama yang mendukung keberhasilan ini adalah kompetensi tinggi yang dimiliki oleh para penyuluh perikanan, baik dari segi keterampilan teknis maupun pendekatan manajerial dalam mendampingi kelompok sasaran. Dengan adanya penyuluh yang berpengalaman dan memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, kegiatan penyuluhan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, strategi penempatan penyuluh di lokasi masing-masing juga memberikan dampak positif terhadap efektivitas penyuluhan.

Dari hasil analisis penyuluhan selama ini, motivasi pelaku utama dan pelaku usaha perikanan dalam membentuk kelompok terus meningkat. Banyak kelompok yang mulai memahami pentingnya kemandirian dalam usaha perikanan dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang lebih progresif, sejalan dengan tujuan utama penyuluhan, yaitu membentuk kelompok yang mandiri dan berdaya saing. Untuk semakin mengoptimalkan pencapaian kinerja, beberapa langkah strategis terus dilakukan. Salah satunya adalah pertemuan rutin penyuluh perikanan, baik secara daring melalui Zoom Meeting maupun secara langsung di lapangan. Pertemuan ini berfungsi sebagai sarana evaluasi kinerja, pembaruan informasi terkait capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), serta sebagai forum diskusi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi.

Selain itu, peningkatan kapasitas penyuluh perikanan terus dilakukan, baik dalam aspek teknis maupun manajerial, agar mereka lebih adaptif dalam menghadapi dinamika di lapangan. Pemerataan jumlah penyuluh perikanan juga menjadi perhatian utama, dengan menyesuaikan lokasi penempatan berdasarkan potensi perikanan di wilayah binaan BPPP Bitung. Sebagai upaya berkelanjutan, penyuluh tetap melaksanakan pendampingan secara intensif kepada kelompok perikanan dan kelautan di wilayah binaannya masing-masing. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong kelompok sasaran untuk semakin mandiri dan meningkatkan pendapatan mereka, sehingga sektor kelautan dan perikanan dapat berkembang lebih optimal serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

IKSK.01.02 Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (Kelompok)

Tabel 22. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (Kelompok)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan										
IK 2. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (Kelompok)										
Realisasi TW III 2021 - 2024				2025					Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Capaian	% Penurunan TW III 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
12,00	20,00	25,00	102,00	80,00	48,00	55,00	114,58%	46,08	80,00	68,75

Selama periode 2021–2024, capaian peningkatan kelas kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung oleh BPPP Bitung menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan realisasi berturut-turut sebesar 12 kelompok pada 2021, 20 kelompok pada 2022, 25 kelompok pada 2023, dan meningkat tajam menjadi 102 kelompok pada 2024. Pada tahun 2025, target peningkatan kelompok ditetapkan sebesar 80 kelompok, sementara target khusus untuk Triwulan III tahun 2025 adalah 48 kelompok. Realisasi capaian hingga Triwulan III mencapai 55 kelompok, atau 114,58% dari target triwulan, menunjukkan kinerja yang melampaui sasaran. Namun,

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2024), terdapat penurunan sebesar 46,08% pada Triwulan III 2025. Berdasarkan rencana kegiatan jangka menengah BPPP Bitung tahun 2025–2029, target peningkatan kelompok untuk tahun 2025 tetap sebesar 80 kelompok, dengan capaian hingga saat ini sebesar 68,75% dari target. Kelompok yang ditingkatkan kelasnya berdasarkan kelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 23. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya per tingkatan kelas

No	Tingkatan Kelas	Jumlah (kelompok)
1	Pemula Ke Lanjut	28
2	Lanjut ke Madya	27
	Total	55

Berdasarkan Tabel 23, terdapat total 55 kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yang mengalami peningkatan kelas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28 kelompok berhasil naik dari kelas Pemula ke kelas Lanjut, sedangkan 27 kelompok lainnya meningkat dari kelas Lanjut ke kelas Madya. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan kapasitas dan kemandirian kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung dalam menjalankan kegiatan usahanya. Proses peningkatan kelas tersebut mencerminkan keberhasilan program pembinaan dan pendampingan yang telah dilakukan, sehingga kelompok mampu meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta keberlanjutan usaha mereka.

Kegiatan positif yang dilakukan dalam upaya menunjang pencapaian target IKU ini adalah melaksanakan pembinaan dan pendampingan secara intensif baik secara langsung maupun melalui rapat online kepada penyuluh perikanan di Wilayah Satminkal BPPP Bitung. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (Kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (kelompok)	Realisasi Capain Satker (kelompok)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	70	84	120,00
2	BPPP Tegal	-	-	-
3	BPPP Banyuwangi	130	200	120,00
4	BPPP Ambon	16	20	120,00
5	BPPP Bitung	48	55	114,58

Berdasarkan Tabel 24, kegiatan peningkatan kelas kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung yang dilaksanakan oleh BPPP Bitung dibandingkan dengan BPPP lain dalam lingkup BPPSDMKP menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari data tersebut terlihat bahwa BPPP Medan menargetkan 70 kelompok dan berhasil merealisasikan 84 kelompok atau mencapai 120% dari target.

BPPP Banyuwangi juga menunjukkan capaian yang sama tinggi dengan realisasi 200 kelompok dari target 130 kelompok (120%). Sementara itu, BPPP Ambon berhasil meningkatkan 20 kelompok dari target 16 kelompok, juga dengan tingkat capaian 120%. Adapun BPPP Bitung menargetkan peningkatan kelas sebanyak 48 kelompok, dan berhasil merealisasikan 55 kelompok, dengan persentase capaian 114,58%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu, BPPP Tegal belum memiliki target maupun realisasi peningkatan kelas pada periode ini. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa satuan pelaksana di bawah BPPSDMKP, termasuk BPPP Bitung, telah berhasil melaksanakan program peningkatan kapasitas kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung secara efektif dan melampaui target yang direncanakan.

Keberhasilan peningkatan kelas kelompok kelautan dan perikanan tidak hanya dilihat dari pencapaian target, tetapi juga dari peran aktif pelaku utama/usaha sebagai subjek yang menetapkan tujuan, mengelola sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Diharapkan, mereka dapat menjadi penggerak utama dalam pembentukan kelembagaan yang kuat dan mandiri untuk mencapai tujuan bersama. Efisiensi sumber daya manusia dalam program ini didukung oleh keterlibatan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu yang tersebar di masing-masing wilayah kerja. Keberhasilan pencapaian kinerja juga didorong oleh penyampaian informasi yang berkelanjutan melalui rapat rutin mingguan untuk memperbarui data IKU, memastikan perubahan data dukung yang harus dipenuhi, serta menyesuaikan persyaratan administratif seperti tanda tangan sertifikat kenaikan kelas oleh pejabat minimal setingkat Camat dan/atau Kepala Dinas. Selain itu, pengecekan nomor urut dilakukan secara sistematis dengan penggunaan rumus untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan. Verifikasi ganda juga diterapkan guna meminimalisir kesalahan data dukung. Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja hingga akhir Triwulan III Tahun 2025, BPPP Bitung menetapkan beberapa strategi utama, yaitu:

1. Penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Penyuluh mengidentifikasi dan meningkatkan kelas kelompok berdasarkan kriteria yang telah ditentukan melalui proses pendampingan.
3. Pengukuhan kelompok melalui Surat Keputusan dan verifikasi oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.

Dengan strategi ini, diharapkan kelompok usaha perikanan dapat lebih berkembang, mandiri, dan berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan berkontribusi pada pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

KSK.01.03 Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (Kelompok)

Indikator Kinerja Utama (IKU) kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk merupakan indikator kinerja yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/usaha kelautan dan perikanan yang dibentuk oleh Penyuluh Perikanan SATMINKAL BPPP Bitung dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Peraturan Menteri KP Nomor 28 tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan. Dalam proses penumbuhannya Penyuluh melibatkan unsur pemerintah daerah dan atau Kepala Dinas Perikanan setempat. Capaian IKU kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Bitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (Kelompok)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan										
IK 3. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)										
Realisasi TW III				2025					Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021 - 2024										
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Capaian	% Penurunan TW III 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
153.00	169.00	130.00	224.00	296.00	100.00	120.00	120%	46.43	296.00	40.54

Selama periode 2021–2024, capaian pembentukan kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung oleh BPPP Bitung menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021 terbentuk sebanyak 153 kelompok, meningkat pada 2022 menjadi 169 kelompok, namun sempat menurun pada 2023 menjadi 130 kelompok, dan kembali meningkat signifikan pada 2024 menjadi 224 kelompok. Untuk tahun 2025, ditetapkan target tahunan sebesar 296 kelompok, dengan target triwulan III sebesar 100 kelompok. Realisasi triwulan III tahun 2025 mencapai 120 kelompok, atau 120% dari target triwulan III, yang menunjukkan kinerja sangat baik pada periode tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi triwulan III tahun 2024, terdapat penurunan sebesar 46,43%, yang mengindikasikan perlunya penguatan kembali strategi pelaksanaan pembentukan kelompok agar capaian dapat meningkat pada triwulan berikutnya. Penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya penyesuaian persyaratan data dukung dalam Manual IKU dan adanya blokir anggaran (efisiensi) serta baru terbitnya Permen KP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP sehingga perlu penyesuaian data dukung. Secara keseluruhan, terhadap target tahunan 2025 (296 kelompok), capaian hingga triwulan III tahun 2025 baru mencapai 40,54%, sehingga masih dibutuhkan upaya akselerasi kegiatan pada triwulan IV agar target tahunan dapat terpenuhi.

Tabel 26. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung per bidang dan gender

No	Bidang	Jumlah (kelompok)	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Budidaya	37	300	92
2	Penangkapan	63	659	20
3	Pengolahan/Pemasaran	20	43	158
	Jumlah	120	1.002	270

Berdasarkan data pada Tabel 26, kegiatan pembentukan kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung oleh BPPP Bitung mencakup tiga bidang utama, yaitu budidaya, penangkapan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan total sebanyak 120 kelompok yang telah terbentuk. Pada bidang penangkapan, tercatat jumlah kelompok terbanyak yaitu 63 kelompok, melibatkan 659 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa bidang penangkapan masih didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Sementara itu, bidang budidaya perikanan membentuk 37 kelompok dengan jumlah peserta 300 laki-laki dan 92 perempuan, menggambarkan tingkat partisipasi perempuan yang relatif lebih tinggi dibandingkan bidang penangkapan. Adapun pada bidang pengolahan dan pemasaran, terbentuk 20 kelompok dengan 43 laki-laki dan 158 perempuan, memperlihatkan bahwa bidang ini lebih banyak melibatkan tenaga kerja perempuan, sejalan dengan karakteristik kegiatan pasca panen yang umumnya dikelola oleh perempuan.

Secara keseluruhan, total peserta yang terlibat dalam pembentukan kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung oleh BPPP Bitung mencapai 1.272 orang, terdiri dari 1.002 laki-laki dan 270 perempuan. Data ini menunjukkan adanya keterlibatan lintas gender yang cukup seimbang di beberapa bidang, khususnya pada kegiatan budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (Kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (kelompok)	Realisasi Capain Satker (kelompok)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	370	422	114,05
2	BPPP Tegal	-	-	-
3	BPPP Banyuwangi	267	350	120,00
4	BPPP Ambon	60	80	120,00
5	BPPP Bitung	100	120	120,00

Berdasarkan data capaian pembentukan kelompok pelaku usaha atau pelaku pendukung oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) lingkup BPPSDMKP tahun 2025, terlihat bahwa sebagian besar satuan kerja berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. BPPP Medan mencatat capaian sebesar 422 kelompok dari target 370 kelompok, atau 114,05% dari target, menunjukkan kinerja yang sangat baik. BPPP Banyuwangi juga menunjukkan performa optimal dengan capaian 350 kelompok dari target 267 kelompok, setara dengan 120% dari target. Sementara itu, BPPP Ambon berhasil mencapai 80 kelompok dari target 60 kelompok, juga dengan tingkat capaian 120%. BPPP Bitung mencatat capaian 120 kelompok dari target 100 kelompok, yang berarti 120% dari target, menunjukkan kontribusi positif terhadap pencapaian program secara keseluruhan. Adapun BPPP Tegal tidak memiliki target maupun realisasi capaian pada periode tersebut, sehingga tidak dapat dihitung persentasenya. Secara umum, kinerja satuan kerja lingkup BPPSDMKP menunjukkan hasil yang melampaui target nasional, menandakan efektivitas pelaksanaan program penyuluhan dan pembentukan kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung di berbagai wilayah.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini hingga akhir Triwulan II Tahun 2025, beberapa langkah strategis yang dilakukan meliputi peningkatan intensitas pendampingan bagi kelompok baru agar mampu berkembang secara mandiri, optimalisasi koordinasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat legalisasi dan pengesahan kelompok, serta pengawasan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan kelompok guna memastikan efektivitas program dan pencapaian indikator kinerja. Dengan strategi ini, diharapkan kelompok yang dibentuk dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan anggota serta pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Analisis keberhasilan pada IKU ini menunjukkan bahwa pelaku utama/usaha perikanan mendapatkan pembinaan dari penyuluh perikanan dan penyuluh perikanan bantu yang memiliki usaha di bidang perikanan, terorganisasi, serta memiliki tujuan yang sama untuk mencapai kemandirian. Efisiensi sumber daya manusia juga menjadi faktor pendukung keberhasilan, di mana kegiatan ini melibatkan aparat desa, pelaku utama/usaha perikanan, masyarakat, dan penyuluh. Antusiasme masyarakat dalam membentuk kelompok perikanan menjadi faktor pendorong yang signifikan, menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap manfaat berkelompok semakin meningkat. Selain itu, keterlibatan aktif penyuluh yang turun langsung ke lapangan berperan penting dalam membentuk dan membina kelompok. Sosialisasi yang tepat memberikan wawasan kepada pelaku usaha, membantu mereka memahami keuntungan dari pembentukan kelompok.

Pertemuan rutin setiap minggu menjadi forum yang efektif untuk memastikan pemenuhan data dukung capaian kinerja IKU, sekaligus menjadi wadah pertukaran informasi serta pencarian solusi atas berbagai tantangan yang muncul. Dengan demikian, setiap perubahan pada indikator kinerja dapat segera ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja hingga akhir Triwulan III Tahun 2025, BPPP Bitung menerapkan beberapa strategi utama, termasuk memastikan bahwa setiap penyuluh terus melakukan pendampingan kepada kelompok perikanan dan kelautan sesuai dengan wilayah binaannya serta memperkuat koordinasi dalam mengidentifikasi dan membentuk kelompok perikanan baru.

IKSK.01.04. Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan dengan kriteria sesuai dengan Permen KP Nomor 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Tabel 28. Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (Unit)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan										
IK 4. Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)										
Realisasi TW III 2021 - 2024				2025					Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW III 2025	Realisasi TW III 2025	% Capaian	% Penurunan/Kenaikan TW III 2024 - 2025	Target 2025	% Capaian Thd Target 2025
-	-	-	-	27,00	17,00	20,00	117,65	0,00	27,00	74,07

Pada periode 2021 hingga 2024, belum terdapat data realisasi kegiatan pendampingan untuk indikator ini, karena pelaksanaannya baru dimulai pada tahun 2025. Pada tahun 2025, BPPP Bitung menetapkan target tahunan sebanyak 27 unit gabungan kelompok/koperasi/korporasi yang akan mendapatkan pendampingan. Untuk triwulan III tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 17 unit, dengan realisasi mencapai 20 unit, atau 117,65% dari target triwulan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan telah melampaui target triwulan yang direncanakan. IKU Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung merupakan IKU baru pada Tahun 2025 sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, terhadap target tahunan 2025, capaian hingga triwulan III mencapai 74,07%, menandakan bahwa BPPP Bitung berada pada jalur yang tepat untuk memenuhi target tahunannya. Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29. Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di
BPPP Bitung (orang)

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (orang)	Realisasi Capain Satker (orang)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	23	28	120,00
2	BPPP Tegal	-	-	-
3	BPPP Banyuwangi	22	40	120,00
4	BPPP Ambon	10	11	110,00
5	BPPP Bitung	17	20	117,65

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2025, capaian pendampingan terhadap gabungan kelompok, koperasi, dan korporasi oleh BPPP lingkup BPPSDMKP menunjukkan hasil yang positif dan melampaui target yang telah ditetapkan. BPPP Medan menargetkan pendampingan kepada 23 orang, dengan realisasi sebanyak 28 orang, atau 120% dari target, yang menunjukkan pelaksanaan program berjalan sangat baik. BPPP Banyuwangi juga mencatat capaian optimal dengan realisasi 40 orang dari target 22 orang, atau 120% dari target, mencerminkan efektivitas pendampingan di wilayah kerjanya. Sementara itu, BPPP Ambon berhasil mencapai 110% dari target, dengan realisasi 11 orang dari target 10 orang. BPPP Bitung turut menunjukkan kinerja baik, dengan realisasi 20 orang dari target 17 orang, atau 117,65% dari target, yang mengindikasikan pelaksanaan pendampingan berjalan melebihi rencana. Adapun BPPP Tegal tidak memiliki data target maupun realisasi capaian pada periode ini. Secara keseluruhan, capaian BPPP lingkup BPPSDMKP menunjukkan hasil yang melampaui 100% dari target yang ditetapkan, menandakan pelaksanaan program pendampingan terhadap gabungan kelompok, koperasi, dan korporasi di sektor kelautan dan perikanan telah berjalan efektif dan berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian IKU Gabungan Kelompok, Koperasi, atau Korporasi yang mendapatkan pendampingan di BPPP Bitung antara lain ditentukan oleh komitmen dan sinergi antara penyuluh perikanan, fasilitator lapangan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam sektor perikanan. Keberhasilan juga dipengaruhi oleh pemetaan kebutuhan pendampingan yang tepat sasaran, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Selain itu, adanya dukungan kebijakan internal, sistem pelaporan yang terstruktur, dan monitoring evaluasi berkala turut memperkuat pencapaian indikator ini. Kegiatan strategis yang dilakukan meliputi identifikasi dan pemetaan kelompok sasaran, penyusunan rencana kerja pendampingan, pelaksanaan kegiatan pelatihan dan fasilitasi, penguatan kapasitas kelembagaan, pembinaan manajemen usaha, serta pelaporan hasil pendampingan secara berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Sasaran Kegiatan 2 Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

IKSK.02.01 Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Bitung (Paket)

Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Bitung belum diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III.

Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKSK.03.01 Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)

Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III.

3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

3.3.1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran lingkup BPPP Bitung berdasarkan data laporan realisasi SP2D per tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 31.036.798.668,- atau 49,49% dari total pagu Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar Rp51.016.036.998,-. Realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 30. Realisasi Anggaran Per 30 Juni 2025 BPPP Bitung

No	Sasaran Kinerja	No	Indikator	Pagu Total	Realisasi	Persentase Realisasi Pagu Total
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Bitung (orang)	9.000.000	-	0,00%
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	3.045.086.000	33.447.300	82,18%
		3	Nilai PNBSP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)	90.874.000	-	16,09%
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat	9.000.000	-	82,18%
2	Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	5	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung (unit)	35.000.000	-	0,00%
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	2.569.700.000	1.658.907.481	84,14%
		7	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (Indeks)	70.000.000	9.991.300	84,14%
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung(%)	2.569.700.000	1.658.907.481	0,00%
		9	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	30.000.000	-	0,00%
		10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%)	2.569.700.000	1.658.907.481	84,14%
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	2.569.700.000	1.658.907.481	0,00%
		12	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	20.000.000	-	0,00%
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	40.000.000	-	0,00%
	TOTAL			13.627.760.000	6.679.068.525	33,30%
1	Terselenggaranya PenyuluhanKelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	6.309.907.833	5.436.259.658	85,40%
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	6.309.907.833	5.436.259.658	85,40%

		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	6.309.907.833	5.436.259.658	85,40%
		4	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)	6.309.907.833	5.436.259.658	85,40%
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	5	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Bitung	6.309.907.833	5.436.259.658	85,40%
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)	5.838.737.833	5.035.899.658	85,40%
TOTAL				37.388.276.998	32.217.197.948	85,40%
TOTAL PELATIHAN + PENYULUHAN				51.016.036.998	38.896.266.472	59,35%

Sumber : Saktiweb

3.3.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di BPPP Bitung

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, terdapat dua unsur penting dalam penilaian kinerja anggaran. Pertama, variabel penilaian kinerja anggaran Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 22/PMK.02/2021 menyebutkan bahwa variabel yang digunakan untuk mengukur nilai kinerja anggaran adalah capaian output; penyerapan anggaran; efisiensi; dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Perangkat atau aplikasi yang digunakan untuk mengukur nilai kinerja anggaran saat ini adalah SMART DJA. Efisiensi sumber daya pada BPPP Bitung dapat dihitung dengan cara selisih dari presentase capaian kinerja dikurangi dengan presentase realisasi anggaran. Efisiensi sumber daya dengan membandingkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 31. Efisiensi Anggaran Per 30 Juni 2025 BPPP Bitung

Sasaran Kinerja	Indikator	Capaian Kinerja	Pagu Total	Realisasi	Persentase Realisasi Pagu Total	Persentase Efisiensi
Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Bitung (orang)	-	9.000.000	-	0,00%	0,00%
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	100,00	3.045.086.000	33.447.300	82,18%	17,82%
	Nilai PNBSP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)	120,00	90.874.000	-	16,09%	103,91%
	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat	-	9.000.000	-	82,18%	-82,18%
Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung (unit)	-	35.000.000	-	0,00%	0,00%
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	100,00	2.569.700.000	1.658.907.481	84,14%	15,86%

Akuntabel Bidang	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (Indeks)	-	70.000.000	9.991.300	84,14%	-84,14%
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	100,00	2.569.700.000	1.658.907.481	0,00%	100%
	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	-	30.000.000	-	0,00%	0,00%
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%)	-	2.569.700.000	1.658.907.481	84,14%	-84,14%
	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	120,00	2.569.700.000	1.658.907.481	0,00%	120,00%
	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	-	20.000.000	-	0,00%	0,00%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	-	40.000.000	-	0,00%	0,00%
TOTAL			13.627.760.000	6.679.068.525	33,30%	8,24%
Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	100,27	6.309.907.833	5.436.259.658	85,40%	14,87%
	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	114,58	6.309.907.833	5.436.259.658	85,40%	29,18%
	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	120,00	6.309.907.833	5.436.259.658	85,40%	34,60%
	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)	117,65	6.309.907.833	5.436.259.658	85,40%	32,25%
Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Bitung	-	6.309.907.833	5.436.259.658	85,40%	-85,40%
Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)	-	5.838.737.833	5.035.899.658	85,40%	-85,40%
TOTAL			37.388.276.998	32.217.197.948	85,40%	-9,98%
TOTAL PELATIHAN + PENYULUHAN			51.016.036.998	38.896.266.472	59,35%	-0,87%

Sumber : Aplikasi Kinerja KKP dan Saktiweb

Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai efisiensi anggaran pada BPPP Bitung yaitu;

1. Perencanaan

Efisiensi anggaran dilakukan BPPP Bitung dalam beberapa dimensi, yaitu: Dimensi efisiensi pertama mengutamakan manfaat. Oleh karena itu dibuat inisiatif strategis berupa indikator outcome dan pengawalannya. Dimensi efisiensi kedua menetapkan prioritas kegiatan. Pada Triwulan II Tahun 2025 BPPP Bitung telah menetapkan kegiatan prioritas yang pengawalannya dilakukan secara rutin (weekly report) dan berkala (pembahasan bulanan) untuk mendapatkan rekomendasi memadai.

2. Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan kegiatan dengan dilakukan koordinasi, sosialisasi, supervisi, dan evaluasi secara daring maupun blended (tatap muka dan daring); melaksanakan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dengan pimpinan berbasis SKP; dan melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam rangka mendukung program prioritas Eselon I KKP.

3. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

- Melaksanakan pengawalan pengelolaan anggaran agar tepat Penggunaan dan sesuai aturan perundangundangan secara rutin dan berkala. Efisiensi pemantauan secara rutin dan berkala melalui aplikasi dan digitalisasi mempercepat dan mempermudah memperoleh informasi dan hasil pengukuran sehingga pimpinan mendapatkan gambaran kondisi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dan segera memberikan rekomendasi kebijakan bila diperlukan. Aplikasi yang dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja yaitu E-Pegawai KKP, Kinerjaku KKP, Emonev Bappenas, OM SPAN DJPB Kemenkeu, serta Weekly Report BPPP Bitung;
- Membayarkan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagai bentuk insentif atas kinerja/kontribusi yang diberikan pada organisasi, dibayarkan berdasarkan capaian kinerja dan progress kerja disamping presensi kehadiran.

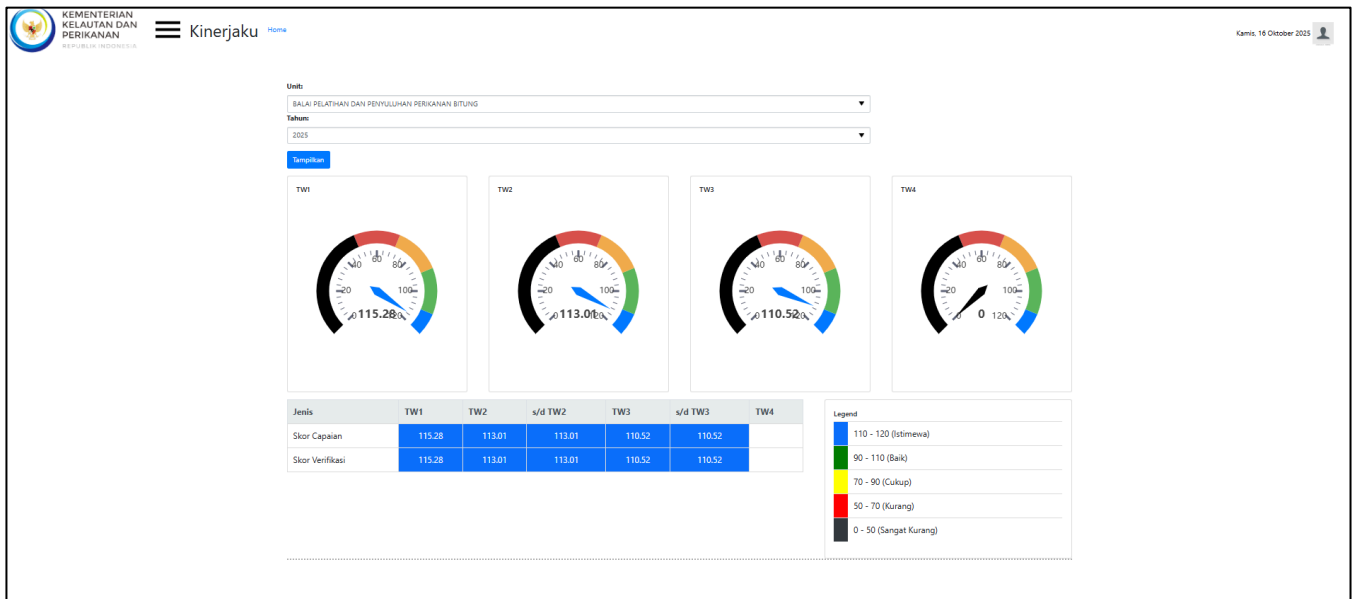
4. Penyesuaian

Pelaksanaan revisi indikator, target/volume kinerja dan anggaran dilakukan bila dari hasil reviu diperlukan perubahan, penambahan, dan pergeseran bila diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. BPPP Bitung melakukan beberapa penyesuaian diantaranya melakukan proses identifikasi dan revisi.

BAB IV. PENUTUP

4.1. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BPPP Bitung Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Bitung Triwulan III Tahun 2025 yaitu 110,52%.



Gambar 4. Nilai Kinerja Organisasi BPPP Bitung

Sumber : web.kinerjaku.kkp.go.id

Capaian kinerja yang dicapai yaitu pada 6 Sasaran Strategis dan 19 indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Bitung yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III karena adanya blokir anggaran (efisiensi);
- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung tercapai sebesar 400 orang dari target yaitu sebesar 400 orang dengan persentase 100%;
- Nilai PNBP Satker BPPP Bitung tercapai sebesar 0,12 Rupiah Miliar dari target yaitu sebesar 0,07 Rupiah Miliar dengan persentase 120%;

- Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi di BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III karena adanya blokir anggaran (efisiensi);
2. Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan:
- Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III karena adanya blokir anggaran (efisiensi);
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan:
- Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung tercapai 75% dari target yaitu 75% atau dengan persentase capaian 100%;
 - Indeks profesionalitas ASN BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III;
 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung yaitu 85% dari target 85% atau dengan persentase capaian 100%;
 - Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III;
 - Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III;
 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung yaitu 100% dari target 80% atau dengan persentase capaian 120%;
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III;
 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III;
4. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan :
- Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung sebanyak 1.504 kelompok dari target yaitu 1.500 kelompok atau dengan persentase 100,27%. Realisasi triwulan ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu karena adanya blokir anggaran (efisiensi) dan baru terbitnya Permen KP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP sehingga perlu penyesuaian data dukung;
 - Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung sebanyak 55 kelompok dari target yaitu 48 kelompok atau dengan persentase 114,58%.

- Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung sebanyak 120 kelompok dari target sebesar 100 kelompok atau dengan persentase 120%. Realisasi triwulan ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu karena adanya blokir anggaran (efisiensi) Penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya penyesuaian persyaratan data dukung dalam Manual IKU dan adanya blokir anggaran (efisiensi) dan baru terbitnya Permen KP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor KP sehingga perlu penyesuaian data dukung;
 - Gabungan Kelompok / Koperasi / Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung sebanyak 20 kelompok dari target sebesar 17 kelompok atau dengan persentase 117,65%;
5. Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan :
- Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III ;
6. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan :
- Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung belum dapat diukur dikarenakan IKU tersebut tidak terdapat target pada triwulan III;

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

Capaian kinerja BPPP Bitung Triwulan III tahun 2025 secara umum telah menunjukkan hasil yang istimewa dengan realisasi sebesar 110,52%. Namun, diharapkan pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat dipertahankan dan nilai NKO dapat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Natalia**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Bitung

Natalia

LEMBAR PENGESAHAN		
NO	JABATAN	PARAF
1.	Katimja Serapan Lulusan dan Kemitraan	
2.		



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Natalia**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

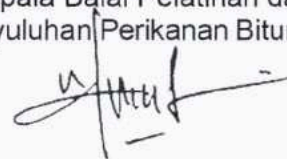
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Bitung

Natalia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (orang)	1.713
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	2.437
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar)	0,18
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Bitung (orang)	30
2	Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Bitung (unit)	1
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	100
		7	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	83
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	85
		9	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	80
		10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%)	80
		11	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	80
		12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	92
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (Nilai)	71,5

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	3.188.960.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10.438.800.000
Total Anggaran BPPP Bitung		13.627.760.000

Jakarta, 27 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Lilly Aprilia Pregiwati

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Bitung

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Natalia", is written over the text of the first party.

Natalia



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN BANYUWANGI MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Natalia**

Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Bitung



Natalia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	2.998
		2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	80
		3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	296
		4	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)	27
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	5	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Bitung	1
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang)	8

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2.500.363.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	35.032.427.000
Total Anggaran BPPP Bitung		37.532.790.000

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Bitung


Natalia



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

JALAN TANDURUSA KELURAHAN AERTEMBAGA
DUA BITUNG 95526 KOTAK POS 18/Bt BITUNG 95501
TELEPON (0438) 21650, 21681 (LACAK), FAKSIMILE (0438) 31477
LAMAN sekretariat@bpppbitung.com

SURAT TUGAS

Nomor : B.27/BPPP.BTG/TU.140/I/2025

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya program dan kegiatan pelatihan dan penyuluhan di BPPP Bitung, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengelolaan kinerja yaitu mulai dari tahap perencanaan, pemantauan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin, dan tahap evaluasi sampai dengan tahap penyusunan laporan kinerja atas capaian kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu menunjuk Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Tahun 2025;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam dalam keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang perubahan ke enam atas Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA- 032.12.2.239260/2025 tanggal 2 Desember 2024;

MEMBERI TUGAS

Kepada : Pegawai sebagaimana terlampir (Lampiran I)

Sebagai : Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung

Dengan Tugas : 1. Pengarah dan Penanggung Jawab
Memberikan arahan dan bimbingan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam penyusunan laporan kinerja atas kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

2. Ketua Tim Teknis Tata Kelola Kinerja

- a. Melakukan Koordinasi, Pengendalian dan Pendampingan dalam rangka melaksanakan verifikasi dan validasi data dukung capaian kinerja pelatihan dan penyuluhan KP
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Tim dalam rangka penyusunan laporan kinerja

3. Sekretaris Tim Teknis Tata Kelola Kinerja

- a. Melakukan pemantauan dan mengidentifikasi permasalahan dalam setiap tahapan proses pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP secara triwulanan dan tahunan;
- b. Melakukan pengukuran dan evaluasi atas pencapaian kinerja pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan KP sesuai rencana kinerja secara berkala, baik bulanan, triwulanan dan tahunan;
- c. Melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan KP sesuai rencana kinerja secara berkala, baik bulanan, triwulanan dan tahunan;

d. Melakukan pelaporan atas hasil pemantuan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP terhadap rencana kinerja tahun 2025 dengan membuat dokumen Evaluasi Kinerja Triwulanan dan Tahunan.

4. Penanggung Jawab Data Capaian Kinerja

Menyampaikan data sesuai form excel capaian kinerja yang telah diverifikasi oleh PIC Tim Kerja masing-masing kepada Tim Verifikator dan Validator;

5. Tim Verifikator dan Validator Data Capaian Kinerja

- a. Melakukan verifikasi dan validasi data dukung capaian kinerja dari masing-masing penanggung jawab data secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan);
- b. Mendokumentasikan hasil verifikasi dan validasi data dukung capaian kinerja secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan).

Biaya : Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA BPPP Bitung Tahun Anggaran 2025

Keterangan : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Bitung, 8 Januari 2025

Kepala Balai,

Natalla, S.St.Pi., M.Pi.

NIP. 19801225 200502 2 001

**DAFTAR NAMA TIM TEKNIS TATA KELOLA KINERJA
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG
TAHUN 2025**

Pengarah dan Penanggung Jawab	:	Kepala Balai
Ketua	:	Merlyn Diana Manurung, S.St.Pi., M.Si.
Sekretaris	:	Muhammad Fiqi Zulendra, S.S.T.Pi., M.Tr.Pi.
Penanggung Jawab Data Capaian Kinerja Pelatihan	:	Pungky Herlambang, A.Md., S.Tr.Pi.
Penanggung Jawab Data Capaian Kinerja Penyuluhan	:	Ledy J. E. Pangkola, S.H., M.H.
Penanggung Jawab Data Capaian Kinerja Dukungan Manajemen	:	Sri Widiyanti, S.Pi.
Tim Verifikator dan Validator		
- Data Capaian Kinerja Pelatihan	:	Adi Kuswoyo, S.Pi
- Data Capaian Kinerja Penyuluhan	:	- Ir. Sari J. Kasijo
	:	- Trixa Rumajar, S.Pi., M.Si.
		- Deysy Marya Puansalaing, S.Pi., M.Si
- Data Capaian Kinerja Dukungan Manajemen		Muhammad Fiqi Zulendra, S.S.T.Pi., M.Tr.Pi.

Bitung, 8 Januari 2025

Kepala Balai,



Natalia, S.St.Pi., M.Pi.

NIP. 19801225 200502 2 001